



KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI RIAU

KEPUTUSAN  
KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI RIAU  
NOMOR 151 TAHUN 2025

TENTANG  
PEMBENTUKAN TIM PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH  
BEBAS DARI KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI  
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI RIAU

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI RIAU,

- Menimbang** : a. bahwa untuk menindaklanjuti Implementasi Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No 90 Tahun 2021 dan Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah sebagaimana diubah Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No 5 Tahun 2024 serta memperhatikan surat Ketua KPU Nomor 1766/PW.02-SD/11/2025 tanggal 17 Oktober 2025 tentang Langkah-Langkah Strategis Dalam Rangka Percepatan Pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas Pada Satuan Kerja Komisi Pemilihan Umum Provinsi Riau;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Riau tentang Pembentukan Tim Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Riau;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250);

2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 6547)
5. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025;
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi Tahun 2020-2024;
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 26 Tahun 2020 tentang Pedoman Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi;
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang

Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);

9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 612/ort.04-Kpt/05/KPU/XII/2020 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi Komisi Pemilihan Umum Tahun 2020-2024;
10. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 314/ORT.07-Kpt/01/KPU/V/2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

MEMUTUSKAN :

**Menetapkan**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI RIAU TENTANG PEMBENTUKAN TIM PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI RIAU.

KESATU

Membentuk dan menetapkan Tim Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Riau, yang terdiri dari:

1. Tim Pengarah
2. Tim Pelaksana, yang terbagi dalam ;
  - a. Tim Manajemen Perubahan;
  - b. Tim Penataan Tata Laksana;
  - c. Tim Penataan Manajemen Aparatur Sipil Negara;
  - d. Tim Pengawasan;
  - e. Tim Penguatan Akuntabilitas Kinerja;
  - f. Tim Penguatan Kualitas Pelayanan Publik.

KEDUA

Susunan keanggotaan Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan keputusan ini.

KETIGA

Tugas Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan keputusan ini.

KEEMPAT

Tim Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani sebagaimana dimaksud dalam Diktum

KELIMA

KESATU bertanggungjawab kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Provinsi Riau.  
Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Pekanbaru  
pada tanggal : 17 Oktober 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI RIAU,

ttd

RUSIDI RUSDAN

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KPU PROVINSI RIAU  
Kabag Hukum, Teknis dan Hupmas,



LAMPIRAN I  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI RIAU  
NOMOR : 151 TAHUN 2025  
TENTANG PEMBENTUKAN TIM  
PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU  
WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI DAN  
WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI  
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI RIAU

DAFTAR NAMA TIM PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH  
BEBAS DARI KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI  
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI RIAU

| No       | NAMA                               | JABATAN   | JABATAN<br>DALAM TIM             |
|----------|------------------------------------|---|----------------------------------|
|          | <b>PENGARAH</b>                    |   |                                  |
| 1        | RUSIDI RUSDAN                      | Ketua   | Pengarah                         |
| 2        | SUPRIYANTO                         | Anggota KPU Provinsi<br>Riau Ketua Divisi Hukum<br>dan Pengawasan               | Pengarah<br>merangkap<br>anggota |
| 3        | NUGROHO NOTO<br>SUSANTO            | Anggota KPU Provinsi<br>Riau Ketua Divisi<br>Sosdiklih, Parmas dan<br>SDM       | Pengarah<br>merangkap<br>anggota |
| 4        | NAHRAWI                            | Anggota KPU Provinsi<br>Riau Ketua Divisi Teknis<br>Penyelenggaraan             | Pengarah<br>merangkap<br>anggota |
| 5        | ABDUL RAHMAN                       | Anggota KPU Provinsi<br>Riau Ketua Divisi<br>Perencanaan, Data dan<br>Informasi | Pengarah<br>merangkap<br>anggota |
|          | <b>PELAKSANA</b>                   |   |                                  |
| 1        | RUDINAL B                          | Sekretaris  | Ketua                            |
| <b>I</b> | <b>TIM MANAJEMEN<br/>PERUBAHAN</b> |   |                                  |
| 1        | RAJA SYAHREZA                      | Kabag Perencanaan, Data<br>dan Informasi  | Anggota                          |
| 2        | RIZKA KURNIA SARI                  | Kasubbag Data dan<br>Informasi  | Anggota                          |
| 3        | PUTRI SANTIKA YULI                 | Pelaksana Subbagian<br>Data dan Informasi                                       | Anggota                          |
| 4        | MUHAMMAD<br>SYAHRIAL               | Pelaksana Subbagian<br>Data dan Informasi                                       | Anggota                          |
| 5        | ROBI ANGGARA                       | Pelaksana Subbagian<br>Data dan Informasi                                       | Anggota                          |
| 6        | NUGROHO WAHYU<br>SAPUTRA           | Pelaksana Subbagian<br>Data dan Informasi                                       | Anggota                          |

|           |                                  |  |         |
|-----------|----------------------------------|--|---------|
| 7         | ADI TRIYONO                      | Pelaksana Subbagian Data dan Informasi | Anggota |
| 8         | EBI ANGGARA                      | Pelaksana Subbagian Data dan Informasi | Anggota |
| <b>II</b> | <b>TIM PENATAAN TATA LAKSANA</b> |  |         |
| 1         | EFRI BOBBY RAFLES                | Kabag Keuangan, Umum dan Logistik      | Anggota |
| 2         | IRA YANITA                       | Kasubbag Keuangan                      | Anggota |
| 3         | NASRUL                           | Kasubbag Umum dan Logistik             | Anggota |
| 4         | RIZA RAMAWANI                    | Pelaksana Subbagian Umum dan Logistik  | Anggota |
| 5         | IKA NOVRITA IRMAYANTI            | Pelaksana Subbagian Umum dan Logistik  | Anggota |
| 6         | NURISARTIKA                      | Pelaksana Subbagian Umum dan Logistik  | Anggota |
| 7         | SUN H. CHRISTOPHER MANURUNG      | Pelaksana Subbagian Umum dan Logistik  | Anggota |
| 8         | WANDA DWI PUTRI                  | Pelaksana Subbagian Umum dan Logistik  | Anggota |
| 9         | BRATA ANDRIADIS                  | Pelaksana Subbagian Umum dan Logistik  | Anggota |
| 10        | ARINTA PUSPITA RESTU             | Pelaksana Subbagian Umum dan Logistik  | Anggota |
| 11        | MUSLIM KAMAL                     | Pelaksana Subbagian Umum dan Logistik  | Anggota |
| 12        | MEYLIZAR                         | Pelaksana Subbagian Umum dan Logistik  | Anggota |
| 13        | JUNAIDI ANDIKA RISWATI           | Pelaksana Subbagian Umum dan Logistik  | Anggota |
| 14        | MHD RAHMAT FITRA                 | Pelaksana Subbagian Umum dan Logistik  | Anggota |
| 15        | ROZI                             | Pelaksana Subbagian Umum dan Logistik  | Anggota |
| 16        | FITRIADI                         | Pelaksana Subbagian Umum dan Logistik  | Anggota |
| 17        | DESKA SATRIA                     | Pelaksana Subbagian Keuangan           | Anggota |
| 18        | SALMIRAT                         | Pelaksana Subbagian Umum dan Logistik  | Anggota |
| 19        | ARIF WIBOWO                      | Pelaksana Subbagian Umum dan Logistik  | Anggota |
| 20        | M ISKANDARSYAH                   | Pelaksana Subbagian Umum dan Logistik  | Anggota |
| 21        | WEDI SUSILO                      | Pelaksana Subbagian Keuangan           | Anggota |
| 22        | DINI LIDYA ASTUTI N              | Pelaksana Subbagian Keuangan           | Anggota |
| 23        | SILVY CHRISTY SINAGA             | Pelaksana Subbagian Keuangan           | Anggota |



|            |   |   |         |
|------------|---|---|---------|
| 24         | MUHAMAD FAHMI                                       | Pelaksana Subbagian Keuangan                      | Anggota |
| 25         | FADHLI ALHUDA                                       | Pelaksana Subbagian Keuangan                      | Anggota |
| 26         | FAKHRIYAH INTAN MAHARANI                            | Pelaksana Subbagian Keuangan                      | Anggota |
| 27         | WIJIYANTI   | Pelaksana Subbagian Keuangan                      | Anggota |
| 28         | HELENA PUTRI  | Pelaksana Subbagian Keuangan                      | Anggota |
| 29         | YOGI OCTA ZAFARLY                                   | Pelaksana Subbagian Keuangan                      | Anggota |
| 30         | DENDA PRATAMA                                       | Pelaksana Subbagian Keuangan                      | Anggota |
| <b>III</b> | <b>TIM PENATAAN MANAJEMEN APARATUR SIPIL NEGARA</b> |   |         |
| 1          | RICKY KURNIAWAN                                     | Kabag Hukum dan SDM                               | Anggota |
| 2          | NASRIANTO   | Kasubbag SDM                                      | Anggota |
| 3          | ANGGIA MURNI  | Pelaksana Subbagian SDM                           | Anggota |
| 4          | PUTRIE MUHARRANI                                    | Pelaksana Subbagian SDM                           | Anggota |
| 5          | SALINA AGUSTIN                                      | Pelaksana Subbagian SDM                           | Anggota |
| 6          | AL FAJRUL   | Pelaksana Subbagian SDM                           | Anggota |
| 7          | NADILA RAB  | Pelaksana Subbagian SDM                           | Anggota |
| 8          | M RAHMAT  | Pelaksana Subbagian SDM                           | Anggota |
| <b>IV</b>  | <b>TIM PENGAWASAN</b>                               |   |         |
| 1          | NIRSON  | Kabag Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Parhubmas | Anggota |
| 2          | FRIDA KUSTINI                                       | Plt Kepala Subbagian Hukum                        | Anggota |
| 3          | MULYADI   | Kepala Subbagian Teknis                           | Anggota |
| 4          | ZULFEN EFFENDY                                      | Pelaksana Subbagian Hukum                         | Anggota |
| 5          | GEBI ADENIA LESTARI                                 | Pelaksana Subbagian Hukum                         | Anggota |
| 6          | AVISKA LOVEANA TOMANDA                              | Pelaksana Subbagian Hukum                         | Anggota |
| 9          | SONYA AMETTA  | Pelaksana Subbagian Teknis                        | Anggota |
| 10         | ERMAWATY  | Pelaksana Subbagian Teknis                        | Anggota |
| 11         | EDWALDHO LAZUARDI VITANDHA                          | Pelaksana Subbagian Teknis                        | Anggota |

|           |  |                                       |         |
|-----------|--|---------------------------------------|---------|
| 12        | SUCI RAMADHANI                                 | Pelaksana Subbagian Teknis            | Anggota |
| 13        | SANDHIE NURSYARFIE BERRY                       | Pelaksana Subbagian Teknis            | Anggota |
| 14        | DELVIANDRI MARLIN                              | Pelaksana Subbagian Teknis            | Anggota |
| 15        | MHD ANANDA KHOIRI                              | Pelaksana Subbagian Teknis            | Anggota |
| 16        | HENDRI SULISTRYANTO                            | Pelaksana Subbagian Teknis            | Anggota |
| <b>V</b>  | <b>TIM PENGUATAN AKUNTABILITAS KINERJA</b>     |                                       |         |
| 1         | RAJA SYAHREZA                                  | Kabag Perencanaan, Data dan Informasi | Anggota |
| 2         | DEWI SILVIA ARIANI                             | Kepala Subbagian Perencanaan          | Anggota |
| 3         | IRA PUSPITA                                    | Pelaksana Subbagian Perencanaan       | Anggota |
| 4         | ERMALENA                                       | Pelaksana Subbagian Perencanaan       | Anggota |
| 5         | RIKY FADLY                                     | Pelaksana Subbagian Perencanaan       | Anggota |
| 6         | YOSRIAL SAPUTRA                                | Pelaksana Subbagian Perencanaan       | Anggota |
| <b>VI</b> | <b>TIM PENGUATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK</b> |                                       |         |
| 1         | RICKY KURNIAWAN                                | Kabag Hukum dan SDM                   | Anggota |
| 2         | ALFA MERRY DELFITA                             | Kasubbag Parhubmas                    | Anggota |
| 3         | FADHLIYAH FAJRIAINI                            | Pelaksana Subbagian Parhubmas         | Anggota |
| 4         | NOVRIWAL                                       | Pelaksana Subbagian Parhubmas         | Anggota |
| 5         | ZIKRI RAMADHAN                                 | Pelaksana Subbagian Parhubmas         | Anggota |
| 6         | MUHAMMAD KUKUH PRAWIRA                         | Pelaksana Subbagian Parhubmas         | Anggota |
| 7         | MEIRIZON                                       | Pelaksana Subbagian Parhubmas         | Anggota |
| 8         | PUTRI NUREKA YANTI                             | Pelaksana Subbagian Parhubmas         | Anggota |

Salinan sesuai dengan aslinya  
 SEKRETARIAT KPU PROVINSI RIAU  
 Kabag Hukum, Teknis dan Hupmas,



Ditetapkan di : Pekanbaru  
 pada tanggal : 17 Oktober 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
 PROVINSI RIAU,

ttd

RUSIDI RUSDAN